



Penyelenggaraan Pendidikan Guru di Era Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949

Mohammad Rikaz Prabowo

Pendidikan Sejarah, Universitas Tanjungpura, Indonesia

E-mail:rikaz.prabowo@fkip.untan.ac.id

Abstract

At the beginning of independence, in 1945-1949, Indonesia experienced a shortage of teachers which resulted in low educational standards. Plus the security conditions where the Dutch tried to thwart Indonesian independence. This research aims to determine teacher development during the 1945-1949 revolution, existing teacher education schools, and obstacles to teacher education. The historical method used through the stages of heuristics, verification, interpretation and historiography obtained the following results. First, changes to the education sector to replace the colonial system were formulated through several formulations, one of which was to meet the teacher shortage. The Education Congress of 1947 determined that education was oriented towards cultivating a spirit of patriotism and willingness to sacrifice. Second, to immediately overcome the teacher shortage, the government established Teacher School C (2 years), Teacher School B (4 years), and Teacher School A (3 years). Vocational teacher schools were also established, such as the Technical Teachers School (KGST), the Women's Skills Teachers School (SGKP), and the Islamic Religious Teachers and Judges School (SGHAI). Third, obstacles to teacher education in this era are not only caused by domestic security conditions, but also due to limited teacher educators and a lack of facilities and teaching materials. For secondary and vocational school teaching, only MO A and B Diploma courses are available. In addition, many teachers' school students choose to join the national defense effort.

Keyword: Teacher Education; Indonesian Independence Revolution 1945-1949

Abstrak

Pada awal kemerdekaan 1945-1949, Indonesia mengalami kekurangan guru yang menyebabkan rendahnya standar pendidikan. Ditambah lagi kondisi keamanan dimana Belanda berusaha menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perkembangan guru pada masa revolusi 1945-1949, sekolah pendidikan guru yang ada, dan hambatan pendidikan guru. Penelitian menggunakan metode historis melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi, dan diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, perubahan di bidang pendidikan menggantikan sistem kolonial dirumuskan melalui sejumlah formulasi salah satunya untuk memenuhi kekurangan guru. Kongres Pendidikan tahun 1947 menetapkan bahwa pendidikan berorientasi pada upaya menanamkan semangat patriotisme dan rela berkorban. Kedua, untuk segera mengatasi kekurangan guru di Sekolah Dasar, pemerintah membentuk Sekolah Guru C (2 tahun), Sekolah Guru B (4 tahun), dan Sekolah Guru A (3 tahun). Sedangkan di sekolah kejuruan dibuka Kursus Guru Sekolah Teknik (KGST), Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP), dan Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHAI). Untuk mengajar di sekolah menengah, hanya tersedia kursus Diploma (akta) MO A dan B. Ketiga, hambatan pendidikan guru di era ini disebabkan oleh kondisi keamanan dalam negeri, keterbatasan guru pendidik, kurangnya fasilitas dan bahan ajar. Selain itu, banyak siswa sekolah guru yang memilih bergabung dalam upaya pembelaan negara.

Kata Kunci: Pendidikan Guru; Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949

Pendahuluan

Pendidikan adalah hak universal setiap warga negara yang dijamin keberadaannya. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa telah menjadi tujuan didirikannya Republik Indonesia (RI). Dengan begitu, sejak berhasil dibentuknya negara RI, pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban menunaikan hak warganegaranya dalam bidang pendidikan. Hal ini senada dengan pendapat Harold J. Laski dalam Sujatmoko (2010: 199), bahwa negara didirikan bertujuan untuk menciptakan keadaan dimana keinginan-keinginan rakyat dapat terkabul secara maksimal, termasuk dalam hal ini keinginan memperoleh pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban dan memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya untuk memajukan pendidikan dan pengajaran kepada rakyatnya.

Dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana yang juga dianut oleh Indonesia, pemerintahan yang demokratis akan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Berusaha menuntaskan masalah-masalah sosial di tengah masyarakat termasuk persoalan pendidikan (Hadiyono, 2020: 24). Sedangkan teori *human capital* dalam perspektif ilmu pendidikan, pemberian pendidikan itu dapat menjadi investasi sumber daya manusia karena dapat digunakan sebagai modal dalam pembangunan nasional (Rahmat, 2017: 155). Akan tetapi di era awal revolusi kemerdekaan 1949-1949 ini, pemerintah menghadapi berbagai macam kesulitan penyelenggaraan pendidikan. Kesulitan itu antara lain kekurangan gedung-gedung sekolah dan tenaga pengajar (guru). Banyak bangunan dan fasilitas pendidikan rusak atau beralih fungsi karena perang, sedangkan tenaga pengajar dari orang-orang Indonesia sendiri jumlahnya masih sangat kurang. Hal ini diperparah dengan kondisi keamanan dan stabilitas negara, dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Masalah ketersediaan guru di era awal kemerdekaan RI, juga terletak pada corak pendidikan guru yang mengalami perubahan drastis sebelum tahun 1945. Sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang 1942-1945 tidak lagi mengarah ke pencapaian intelektualitas dan keterampilan sebagaimana di era Hindia Belanda. Akan tetapi lebih diarahkan untuk pembangunan mental demi kepentingan perang yang sedang dihadapi Jepang. Pendidikan mengalami penyederhanaan yang cukup drastis, tidak hanya fisik sekolahnya namun juga pada jumlah mata pelajaran (Sugiono et al., 2020: 52).

Pada awal proklamasi jumlah guru yang terdidik masih sangat terbatas. Sebagian guru adalah lulusan sekolah *Kweekschool* dan *Normalschool* era Hindia Belanda, *Sjooto Sihan Gakko* dan *Guutoo Sihan Gakko* (masa pendudukan Jepang). Di masa ini seleksi secara ketat dilakukan agar dapat mengajarkan materi-materi sesuai kebijakan corak militerisme Jepang (Aslan & Hifza, 2019: 177). Oleh sebab itu, suatu jenis pendidikan guru mutlak diperlukan untuk merehabilitasi sistem pendidikan guru secara keseluruhan sesuai semangat nasional. Langkah selanjutnya yang diambil pemerintah untuk menanggulangi kekurangan guru yaitu dengan menyelenggarakan sekolah guru yang disesuaikan dengan kondisi saat itu.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang perkembangan pendidikan guru di Indonesia. Dalam penelitian Fadli dan Kumalasari (2019) yang berjudul *Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966)*, mengungkapkan sistem pendidikan di masa awal kemerdekaan masih tidak dapat terlepas dari pengaruh pengajaran di masa Jepang (Fadli & Kumalasari, 2019: 170). Penelitian ini juga membahas penyelenggaraan pendidikan dan sekolah-sekolahnya pasca tahun 1949 yang disebut oleh penelitiannya sebagai masa revolusi pendidikan nasional. Hasil penelitian Kurnia dan Hudaidah (2021) yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Terhadap Kondisi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama (1945-1966)*, juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan era ini sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang ada. Sehingga arah kebijakan pendidikan negara ditekankan akan cita-cita sosialisme (Kurnia & Hudaidah, 2021: 844).

Berbeda dari penelitian di atas, pada penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana penyelenggaraan pendidikan guru di era revolusi kemerdekaan dengan batasan periode 1945-1949. Pengambilan periodisasi ini dianggap penting, sebab menjadi tonggak pertama dalam sejarah Indonesia mampu menghasilkan sendiri lulusan guru di tengah kondisi dan keterbatasan yang ada. Minimnya guru di era awal kemerdekaan akan berdampak pada pendidikan dan pengajaran yang disadari oleh pemerintah sebagai usaha untuk menumbuhkan manusia yang bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara (Sjamsuddin et al., 1993: 14). Penelitian ini akan membahas mengenai gambaran awal kondisi guru di Indonesia di awal kemerdekaan, kemudian dilanjutkan dengan sekolah pendidikan guru yang didirikan sekitar tahun 1945-1949 serta hambatan penyelenggaraannya.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir sejarah dengan melihat realitas dan kausalitas yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia di awal kemerdekaannya, yaitu dari tahun 1945-1949. Sehingga dari hal tersebut, dapat lebih memahami sejarah pendidikan guru di Indonesia dari masa ke masa. Melalui penelitian ini pula, diharapkan dapat tetap memperkuat posisi Pancasila dan UUD 1945 Amandemen sebagai dasar pendidikan Indonesia di tengah arus globalisasi dan modernitas. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan guru dewasa ini diharapkan berhasil menciptakan guru yang profesional, dengan diimbangi kebijakan pemerataan persebaran guru di setiap daerah agar tidak terjadi kesenjangan pendidikan antara kota-desa atau Pulau Jawa-luar Pulau Jawa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang dilalui dengan beberapa tahap yakni melalui pengumpulan sumber atau data (heuristik), melakukan kritik sumber (verifikasi), penafsiran pada sumber-sumber (interpretasi) dan penulisan sejarah (historiografi). Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya ada yang merupakan dokumen, arsip, maupun buku atau jurnal hasil penelitian sebelumnya sepanjang terkait sejarah pendidikan di Indonesia.

Setelah dilakukan kritik pada sumber, selanjutnya diadakan interpretasi atau penafsiran. Interpretasi dilakukan secara plural, yakni asumsi-asumsi sejarah akan muncul mengikuti perkembangan-perkembangan pada saat terjadinya peristiwa seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi (Abbas, 2014: 38). Dalam hal ini, membahas perkembangan pendidikan guru di era revolusi kemerdekaan 1945-1949 juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi riil Indonesia saat itu. Dengan begitu, penulis akan lebih memiliki berbagai sudut pandang dan dapat menentukan arah tulisannya dalam tahapan terakhir yakni penulisan sejarah (historiografi).

Hasil Penelitian

Gambaran Kondisi Pendidikan di Awal Kemerdekaan Indonesia

Pendidikan di masa awal kemerdekaan pasca proklamasi 17 Agustus 1945 diliputi oleh beberapa masalah yang cukup pelik layaknya sebuah negara yang baru lepas dari belenggu penjajahan. Angka buta huruf di kalangan penduduk tergolong tinggi dan fasilitas pendidikan yang jauh dari kata memadai. Dari sisi tenaga pengajar, terjadinya kekurangan tenaga guru membuat standar pendidikan di Indonesia saat itu menjadi cukup rendah. Hal ini masih ditambah dengan kondisi keuangan, sosial, politik, dan keamanan yang belum kondusif. Ancaman terhadap kedaulatan negara dibuktikan dengan kedatangan sekutu yang membonceng Belanda agar dapat kembali menguasai Indonesia. Hal ini berdampak terhadap penyelenggaraan pendidikan dengan tenaga guru yang tersisa menjadi sulit memberikan pengajaran pada situasi perang.

Kemerdekaan Indonesia membawa sejumlah perubahan yang tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja tetapi juga dalam pendidikan. Perubahan di bidang ini bersifat mendasar yaitu menyangkut penyesuaian dengan cita-cita dari suatu bangsa dan negara merdeka. Untuk mengadakan penyesuaian itu, maka bidang pendidikan mengalami perubahan dalam landasan idiilnya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia (Kosasih, 2016). Pendidikan dan pengajaran nasional direncanakan akan bersendikan agama dan kebudayaan bangsa. Hal ini sebagaimana hasil pembahasan Sub Panitia Pendidikan dan Pengajaran BPUPKI pimpinan Ki Hadjar Dewantara sekitar bulan Juni 1945 (Sjamsuddin et al., 1993: 10).

Rencana sendi-sendi pendidikan tersebut merupakan antitesis dari corak pendidikan era sebelumnya yang liberal dan menitikberatkan pada pencapaian kognitif dibanding pembangunan mental. Arah pembangunan pendidikan di awal kemerdekaan tidak dapat dipungkiri merupakan buah pemikiran tokoh pendidikan seperti Ki Hadjar Dewantara yang ingin menghasilkan individu-individu yang bebas dengan semangat merdeka (Herlina, 2017: 136). Oleh sebab itu ia pun diamanahi jabatan sebagai Menteri Pengajaran pertama dalam sejarah pemerintahan RI. Pada tanggal 29 Desember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK), supaya pengajaran dijalankan sesuai dengan rencana pokok-pokok

pendidikan dan pengajaran yang baru. Hal ini mencakup beberapa usulan terkait hal-hal mendasar penyelenggaraan pendidikan, seperti perlu adanya perubahan pedoman pendidikan dan pengajaran baru yang sesuai dengan dasar negara serta hendaknya diadakan satu macam sekolah untuk segala lapisan masyarakat (Suradi Hp et al., 1986: 21).

Bagaimanapun juga, pemberian pendidikan bagi segala lapisan masyarakat merupakan tujuan didirikannya negara ini yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Telah menjadi hak setiap rakyat dan menjadi tugas negara dalam penyelenggaraan pendidikan dengan berlandaskan Pancasila (Dangu et al., 2022: 6). Oleh sebab itu atas usul Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) -yang kala itu bertindak sebagai parlemen-, agar pengajaran dijalankan sesuai dengan rencana pokok pendidikan yang baru. Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang kala itu telah dijabat oleh Mr. Soewandi kemudian membuat Surat Keputusan tanggal 1 Maret 1946 No. 104/Bhg.O untuk membentuk panitia Penyelidik Pengajaran dibawah Ki Hadjar Dewantara dan penulis Soegarda Purwakawatja. Tugas yang dibebankan kepada panitia ini diantaranya merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah, menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan menimbang keperluan yang praktis dan tidak terlalu berat, menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas (Kosasih, 2016: 93-103).

Dalam menjalankan tugas badan penyelidik pengajaran Republik Indonesia, untuk merumuskan kurikulum yang baru diadakan dalam dua kali kongres. Kongres pendidikan pertama di Surakarta (1947) dan kongres pendidikan kedua di Yogyakarta (1949). Setelah kongres pendidikan di Yogyakarta berakhir pada tahun 1949, maka bertambahlah bahan-bahan untuk penyusunan undang-undang pokok pendidikan yang dilakukan oleh panitia. Sayangnya dikarenakan kondisi politik nasional dan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia, undang-undang (UU) itu baru dapat ditetapkan setelah tahun 1949 yakni Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1950 Tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Fadli & Kumalasari, 2019: 170). Tujuan pendidikan berorientasi untuk usaha dalam menanamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh yang dimaksudkan untuk menghasilkan patriot-patriot bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya (Syaharuddin & Susanto, 2019: 63).

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka persatuan dan kesatuan juga perlu digalang di tengah kalangan guru-guru yang tersisa, Sebuah perhelatan antar guru yang kemudian dikenal sebagai Kongres Guru Indonesia I dilaksanakan pada 23 November 1945 di Surakarta. Kongres tersebut dilaksanakan untuk menggalang persatuan dan kesatuan guru-guru se-Indonesia, menghapuskan segala perbedaan antara organisasi guru yang didasari berbagai jenis sekolah, aliran politik, agama, dan sebagainya yang dinilai akan semakin memperbesar perpecahan di kalangan guru. Sebagai gantinya, didirikan sebuah wadah tunggal pemersatu dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang bersifat unitaristik, independen dan non partisan (PB PGRI, 2020).

Kongres Guru Indonesia I atau Kongres PGRI I itu menetapkan asas perjuangan organisasi pada tanggal 25 November 1945. Asas-asas perjuangan yang ditetapkan sebagai berikut: *pertama*, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, *kedua*,

mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, *ketiga*, membela hak serta nasib para buruh pada umumnya dan nasib guru pada khususnya (Aisy & Hudaidah, 2021: 571-572). Dengan dicantumkan asas pertama, yaitu mempertahankan serta menyempurnakan Republik Indonesia, PGRI memiliki tujuan pertama-tama untuk lebih memprioritaskan perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dibanding kepentingan-kepentingan lain sehingga dengan demikian partisipasi guru dalam melaksanakan pengabdian diarahkan untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Selain usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi usaha kekurangan bangunan sekolah, juga tidak kekurangan partisipasi masyarakat yang bergotong royong membangun bangunan sekolah dengan peralatannya dan yang kemudian disumbangkan kepada pemerintah (Aisy & Hudaidah, 2021: 577). Tantangan lain penyelenggaraan pendidikan di masa darurat ialah berkaitan dengan psikis pelajar karena suasana perang yang rawan akan kemunduran semangat belajar. Meskipun begitu pelajar-pelajar yang ada tetap berupaya memperoleh ilmu pengetahuan dalam keadaan bagaimanapun juga. Masalah kurangnya tenaga pendidik diusahakan mencari dan menjumpai para pendidik yang tersisa. Sehingga tidak jarang di era ini seseorang yang tidak berijazah guru pun dapat diminta untuk mengajar atas dasar pengalaman dan pengetahuan di bidang ilmu lainnya (Sjamsuddin et al., 1993: 14).

Untuk pendidikan yang diselenggarakan secara partikelir (swasta) bercorak keagamaan seperti pesantren, juga terpengaruh pada suasana revolusi kemerdekaan. Penyelenggaraan pendidikan di lembaga ini juga kembali direkonstruksi dengan tetap menjadikan kiai atau ulama sebagai tenaga pendidik dan tetap berpola pendidikan asrama. Akan tetapi, banyak santri-santri yang sebenarnya telah menerima pendidikan semi-militer di era pendudukan Jepang khususnya di Pulau Jawa ketika pembentukan tentara PETA dan pasukan Hizbullah-Sabilillah. Sehingga di era revolusi kemerdekaan, banyak santri yang memilih menjalankan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 dengan menghidupkan kembali pasukan Hizbullah-Sabilillah ataupun bergabung di kelaskaran dan TNI (Royani, 2018: 125).

Sekolah- Sekolah Pendidikan Guru Pada Tahun 1945-1949

Adanya peristiwa revolusi kemerdekaan 1945-1949, mengakibatkan pendidikan saat itu mengalami keadaan yang sulit, baik di sarana dan prasarananya, termasuk juga tenaga pengajar. Sebagai gambaran, di awal tahun 1950an Indonesia mengalami kekurangan guru, yang saat itu hanya tersedia sebanyak 20.816. Bahkan jika semua calon murid sekolah rakyat se-Indonesia berhasil ditampung, maka angka kebutuhan guru membengkak mencapai 168.000 guru (Rifa'i, 2016: 136-137). Untuk mengatasi kesulitan tersebut, pemerintah kemudian membuka beberapa sekolah guru selama periode 1945-1949, yakni Sekolah Guru C (SGC), Sekolah Guru B (SGB), dan Sekolah Guru A (SGA). Dibukanya sekolah-sekolah pendidikan guru tersebut dimaksudkan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang dirasakan mendesak dan secepat mungkin dapat bertugas. Hal ini dikarenakan banyaknya sekolah-sekolah yang kembali didirikan pasca perang (Sjamsuddin

et al., 1993: 13). Disamping banyaknya pula murid-murid lama yang berkeinginan melanjutkan sekolahnya karena sempat terhenti karena perang.

Sekolah Guru C (SGC) atau sekolah guru dua tahun, merupakan sekolah yang dibuka dalam tempo yang sangat singkat dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan guru sekolah rakyat yang saat itu dirasa mendesak. Tamatan dari sekolah rakyat ini dapat disamakan dengan *Cursus Volks-Onderwijzer* (CVO) pada zaman Hindia Belanda. CVO merupakan kursus yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan guru bantu di Sekolah Rakyat (SR/*Volkschool*), dan hanya menerima murid lulusan SR atau Sekolah Kelas II di masa kolonial Hindia Belanda dan Jepang (Syaharuddin & Susanto, 2019: 43).

Metode pembelajaran yang dilakukan di SGC agaknya masih mengadopsi sebagian metode di Sekolah CVO. Metodenya yakni 'amat-tiru', dengan melihat dan menyaksikan bagaimana para guru senior mengajar kemudian nanti guru yang lebih muda akan menirukannya. Bahasa pengantarnya yang digunakan kebanyakan bahasa daerah setempat. Sekolah Guru C hanya berjalan kurang lebih 1,5 tahun, karena tidak mendapat dukungan dari PGRI yang berpendapat bahwa guru SD hendaknya dididik selama 4 tahun (Buchori, 2009: 50). SGC kemudian ditutup dan diganti dengan tingkat yang lebih tinggi yakni Sekolah Guru B (SGB) (Fadli & Kumalasari, 2019: 160-161).

Sekolah Guru B (SGB) merupakan sekolah menengah kejuruan yang mendidik calon guru untuk memenuhi kebutuhan pengajar di sekolah rakyat. Lama pendidikannya empat tahun sesudah lulus SR (Suradi Hp et al., 1986: 59). Sekolah ini dianggap sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), akan tetapi lulusan SGB hanya dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Guru A (SGA) dengan menempuh tambahan masa studi selama tiga tahun. Hal ini karena sifat dan kejuruan SGB itu sendiri yang bukan merupakan pendidikan umum. Sebaliknya lulusan SMP justru dapat melanjutkan studinya di SGB dan langsung duduk di tingkat IV (Yonardi, 2018: 16). SGB diselenggarakan baik oleh pemerintah (negeri) dan masyarakat (swasta), bahkan ada yang mendapat subsidi dari negara.

Peserta didik yang ingin masuk ke SGB akan dilihat nilai dari nilai hasil ujian tulis dari SR yang terdiri dari bahasa Indonesia, menulis, pengetahuan umum dan berhitung. Murid lulusan SMP juga dapat diterima di SGB dan akan langsung duduk di bangku kelas IV. Pada dasarnya pelajaran empat tahun tersebut sama dengan tiga tahun pelajaran umum seperti yang diajarkan di SMP, ditambah satu tahun pelajaran kejuruan guru. Sistem ujiannya dilaksanakan sebanyak dua kali yakni pada kelas II dan ujian penghabisan di tingkat IV (Sjamsuddin et al., 1993: 18). Pada kelas satu sampai dengan kelas tiga pelajaran umum lebih banyak diberikan, dan pada akhir tahun ketiga diadakan ujian. Bagi anak-anak yang mempunyai nilai amat baik dapat meneruskan ke SGA tanpa harus melanjutkan pendidikan SGB di tahun keempat (Syaharuddin & Susanto, 2019: 66-67). Pada tahun keempat lebih banyak diberikan pendidikan didaktik, metodik, ilmu jiwa dan praktik mengajar.

Kurikulum SGB menggunakan kurikulum SMP ditambah materi kependidikan. Kurikulum yang digunakan di SGB pada tahun 1945 -1949 menggunakan Rencana Pelajaran 1947. Mata pelajaran yang dipelajari di SGB terdiri dari rumpun ilmu bahasa terdiri dari bahasa Indonesia, Inggris, dan Jawa (daerah). Rumpun ilmu pasti terdiri dari ilmu hayat, ilmu alam, ilmu pasti, dan berhitung. Sedangkan rumpun ilmu sosial terdiri dari sejarah dan ilmu bumi. Di luar itu, siswa SGB juga mendapatkan pelajaran menulis, menggambar, dan pendidikan jasmani, ilmu pendidikan dan tentunya praktik mengajar (Astuti, 2016: 10).

Kementerian Pengajaran dan Pendidikan juga membentuk Sekolah Guru Atas (SGA) yang merupakan pengganti Sekolah Guru Tinggi (SGT) atau *Koto Shihan Gakko* (bentukan Jepang). Peserta didik yang dapat bersekolah di SGA adalah para pemegang ijazah SMP yang cukup mengikuti sekolah ini selama 3 tahun (Buchori, 2009: 50). Siswa SGB tingkat tiga yang naik ke tingkat empat dengan predikat sangat baik juga mendapatkan kesempatan untuk diterima di SGA (Sugiono et al., 2020: 84). Akan tetapi bagi lulusan SR, proses pendidikan di SGA didesain dalam waktu 6 tahun agar mendapatkan ijazah mengajar. Mata pelajaran yang diberikan di SGA sama jenisnya dengan mata pelajaran yang diberikan di SGB, hanya materinya diperluas dan lebih mendalam. Adanya kesamaan mata pelajaran ini dikarenakan adanya anggapan pendidikan guru empat tahun (SGB) belum menjamin pengetahuan cukup untuk taraf pendidikan guru (Aisy & Hudaidah, 2021: 572). Nantinya, lulusan SGB dan SGA tersebut diproyeksikan untuk menjadi guru SR. Beberapa lulusan SGA juga dipersiapkan untuk menjadi guru SMP, terutama di luar Jawa. Hal ini dikarenakan dalamnya materi yang dipelajari sehingga lulusan SGA juga dinilai layak dalam memberikan pelajaran di tingkat SMP (Sjamsuddin et al., 1993: 16).

Selain sekolah-sekolah guru di atas, terdapat pula beberapa sekolah guru yang berdasarkan pendidikan kejuruan. Misalnya, Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) yang lama pendidikannya selama 4 tahun. Agar dapat diterima dalam SGKP, calon murid harus memiliki ijazah serendahnyanya lulusan SMP atau lulusan Sekolah Kepandaian Putri (SKP) (Yonardi, 2018: 52). Terdapat pula Kursus Guru Sekolah Teknik (KGST) dengan keahlian dalam jurusan seperti bangunan sipil, bangunan gedung-gedung, permesinan, listrik, dan percetakan. Lulusan KGST akan mendapatkan ijazah agar dapat mengajar di Sekolah Teknik Pertama (STP) dengan lama pendidikan 2 tahun, Sekolah Teknik (ST) dengan lama pendidikan 2 tahun setelah lulus STP atau SMP bagian B, dan Sekolah Teknik Menengah (STM) dengan lama pendidikan 4 tahun setelah lulus ST (Sjamsuddin et al., 1993: 19-22).

Kementerian Agama RI juga tidak ketinggalan untuk juga mendirikan sekolah guru, khususnya untuk mencetak tenaga-tenaga pendidik yang dapat memberi pelajaran agama Islam. Pada 16 Mei 1948 di Surakarta, didirikan Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHAI) yang dirintis oleh Menteri Agama K.H Faqih Usman. Sekolah ini juga dimaksudkan untuk menghasilkan calon pegawai pada pengadilan agama yang ketika itu dirasa masih kurang. Sayangnya sekolah ini tidak dapat bertahan lama karena gangguan keamanan. Sayangnya sekolah ini tidak dapat bertahan lama menyusul terjadinya Agresi Militer Belanda

pada 18 Desember 1949 (Yonardi, 2018: 29). Untuk pendidikan guru di lingkup pendidikan tinggi dapat dikatakan belum berhasil dibentuk, khususnya dengan pendirian Fakultas Keguruan atau Fakultas Pedagogia. Pemerintah masih fokus membuka kembali dan menasionalisasi sekolah-sekolah tinggi era Hindia Belanda, seperti Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Hukum, dan Sekolah Tinggi Kedokteran.

Hambatan Pendidikan Guru Pada Tahun 1945-1949

Pada tahun 1945-1949, beberapa hambatan dalam pelaksanaan pendidikan guru di Indonesia dipengaruhi kondisi politik dan sosial pasca-kemerdekaan. Hambatan-hambatan itu termasuk ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi pembangunan pendidikan (Fadli & Kumalasari, 2019: 157). Kementerian Pengajaran dan Pendidikan merupakan salah satu kementerian yang turut dipindahkan ketika ibukota RI Jakarta pindah ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Kementerian ini kemudian mendapatkan tempat atau berkantor di Surakarta. Pada Desember 1948 saat Belanda melancarkan serangan terhadap kota-kota di RI termasuk Surakarta, kementerian ini terpaksa dipindahkan ke pedalaman agar kantor dan tata laksananya tetap operasional meskipun dalam keadaan darurat (Sjamsuddin et al., 1993: 9). Kondisi ini jelas menghambat tugas-tugas pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya pada pendidikan guru yang membutuhkan adanya hubungan koordinatif yang baik antara kementerian, sekolah, guru, dan peserta didik.

Pendidikan guru era ini ditekankan pada kecepatan studi daripada kualitas lulusan. Kebutuhan mendesak tenaga guru agar secepat mungkin dapat mengisi kekosongan tenaga pendidik di sekolah-sekolah dasar menjadi penyebabnya. Terutama sekali untuk mengentaskan angka butuh huruf yang cukup tinggi di tengah masyarakat. Hal inilah yang mendorong Sekolah Guru C (SGC) kemudian ditutup karena lulusannya dinilai kurang memiliki kompetensi yang baik dalam memberi pengajaran di Sekolah Rakyat/Dasar (Sjamsuddin et al., 1993: 19). Hambatan lainnya ialah terkait ketersediaan guru pendidik yang terbilang kurang. Hal ini berdampak serius terhadap penyelenggaraan pendidikan guru di periode 1945-1949, guru pendidik yang ditugaskan terpaksa digunakan dari lulusan sekolah umum. Dikarenakan keterbatasan sumber daya pengajar, kurangnya fasilitas, dan bahan ajar, akan berdampak pada proses pembelajaran di sekolah guru. Sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas guru yang dihasilkan.

Hal lain yang menjadi hambatan penyelenggaraan pendidikan guru di era ini ialah kurangnya sekolah guru untuk mengajar di sekolah menengah tinggi (Sekolah Menengah Atas) dan sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah teknik. Oleh sebab itu pemerintah kembali membuka kursus diploma *Middlebare Onderwijs* (MO) A dan MO B seperti di masa Hindia Belanda, untuk pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu bumi. Penyelenggara kursus ini dititipkan pada perguruan tinggi yang telah ada seperti di Sekolah Tinggi Teknik (sekarang Institut Teknologi Bandung). Pembukaan kursus ini baru

dapat dilaksanakan di tahun 1947 dengan mengkonversi Sekolah Guru Menengah Tinggi (SGMT) peninggalan zaman Jepang, ke *Teacher College* untuk siswa yang berminat lanjut ke tingkat IV (Buchori, 2009: 50). Meskipun begitu, jumlah *Teacher College* juga sangat terbatas dan tidak terselenggara dengan baik karena pengaruh kondisi keamanan dan politik negara.

Sekolah-sekolah guru yang menghasilkan guru-guru agama juga masih dirasakan begitu minim, dimana hal ini menjadi domain Kementerian Agama. Untunglah masalah ini dapat terbantuan dari kalangan partikelir (swasta) yang tetap membuka sekolahnya dan melakukan penyesuaian mengikuti alam kemerdekaan. Misalnya pada Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Yogyakarta yang ketika era kolonial Hindia Belanda lebih dikenal dengan *Kweekschool Muhammadiyah*. Untuk menghasilkan lulusan *da'i* atau guru-guru agama Islam, pendidikan tetap menerapkan sistem pesantren dan sekolah umum (Muttaqin, 1995: 45). Begitupula dengan lembaga pendidikan agama Kristen atau Katolik, sekolah-sekolah untuk mencetak guru agama mulai dibuka dengan segala keterbatasannya. Sekolah-sekolah ini mengalami tekanan yang hebat di masa pendudukan Jepang karena banyak yang ditutup dan pemuka agamanya ditahan. Barulah setelah kemerdekaan sekolah-sekolah seperti seminari mulai membuka kembali pendidikannya

Kondisi keamanan dan politik negara memang menjadi faktor utama pendidikan guru di era ini mengalami banyak hambatan. Sekolah-sekolah guru sering diliburkan dan gedung sekolahnya beralih fungsi menjadi markas tentara (Astuti, 2016: 130). Selain itu, banyak pula siswa-siswa sekolah guru lebih memilih untuk turut mengangkat senjata dalam pembelaan negara, dan mendapatkan dukungan kuat oleh guru-guru. Ada yang memilih bergabung ke dalam pasukan gerilyawan-kelaskaran, namun tidak sedikit pula yang tergabung dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) (Alfiyandanu, 2019: 32). Hal demikian juga terjadi di Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) misalnya yang terdapat di Yogyakarta, dimana jumlah peserta didik yang aktif di tahun 1948 hanya tinggal 12 siswi (Anarti & Kumalasari, 2016: 9). Peserta didik dan guru-guru terpaksa meninggalkan sekolah karena alasan keamanan. Akan tetapi sebagian dari mereka tetap melanjutkan pelajaran di rumah masing-masing sembari membantu tugas-tugas Palang Merah Indonesia (PMI) dalam merawat korban perang (Yonardi, 2018: 51).

Hal ini masih ditambah dengan kenyataan bahwa penyelenggaraan sekolah guru ini hanya dapat dilakukan di wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh pemerintah RI, terutama sekali di Pulau Jawa. Wilayah lain di luar Jawa kembali dikuasai oleh Belanda (NICA) yang melanjutkan sistem pendidikan era kolonial, termasuk pada pendidikan gurunya seperti pembukaan kembali *Normalschool* dan *Kweekschool*. Oleh sebab itu pada 1949 diadakan Kongres Pendidikan Antara Indonesia (KPAI) untuk menyamakan persepsi dan persiapan penyelenggaraan pendidikan di masa yang akan datang ketika terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). KPAI diadakan tanggal 15-20 Oktober 1949 di ibukota RI Yogyakarta yang diikuti oleh RI dan negara-negara bagian/daerah federal bentukan Belanda.

Beberapa hasil penting dari kongres itu terkait pendidikan guru ialah diutamakan pengadaan sekolah-sekolah guru secara kilat untuk berbagai jenis pendidikan (Hidayat, 2018: 18).

Kesimpulan

Perubahan tersebut meliputi landasan ideologi, tujuan, dan sistem pendidikan dari sistem kolonial ke sistem nasional Indonesia. Akan tetapi Indonesia mengalami kondisi pendidikan yang cukup parah, salah satunya tentang ketersediaan guru dan kesiapan sekolah guru yang ada. Hal ini diperparah dengan kondisi keamanan dan politik Indonesia kala itu yang kurang stabil karena adanya ancaman dalam maupun luar negeri (Agresi Militer Belanda). Untuk mengatasi kekurangan guru, terutama di tingkat pendidikan dasar-sekolah rakyat (SR) maka sepanjang tahun 1945-1949 pemerintah membuka atau mengizinkan penyelenggaraan sekolah-sekolah guru yang terdiri dari Sekolah Guru C (SGC) pendidikan dua tahun, Sekolah Guru B (SGB) pendidikan empat tahun, dan Sekolah Guru A (SGA) pendidikan enam tahun. SGC merupakan sekolah guru yang diproyeksikan menjadi guru bantu di SR, kemudian ditutup karena kualitas pendidikannya dan ditingkatkan menjadi SGB yang sederajat dengan SMP. Sedangkan SGA lulusannya selain diproyeksi menjadi guru SR, juga dapat mengajar di tingkat SMP. Keberadaan sekolah-sekolah keguruan untuk tingkatan sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan tinggi juga sangat minim. Pada tahun 1947 pemerintah akhirnya mengubah SGMT menjadi *Teacher College* untuk mendapatkan akta MO A dan MO B. Hambatan lainnya yakni cukup banyaknya siswa-siswa sekolah guru yang memilih untuk melakukan pembelaan terhadap negara dengan bergabung di kesatuan-kesatuan TNI maupun gerilyawan dan palang merah. Selain itu, sistem pendidikan guru ini juga hanya dapat diselenggarakan di wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh pemerintah RI, khususnya Pulau Jawa.

Daftar Pustaka

- Abbas, I. (2014). Memahami Metodologi Sejarah Antara Teori dan Praktek *). In *Jurnal ETNOHISTORI* (Vol. 1, Issue 1). <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/848669>
- Aisy, S. R., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Indonesia Di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 569–577. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.327>
- Alfiyandanu. (2019). *Perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Jember Dalam Perang Kemerdekaan Tahun 1946-1948*. Universitas Jember.
- Anarti, R. N., & Kumalasari, D. (2016). Sekolah Guru Kepandaian Putri Negeri Yogyakarta Tahun 1946-1964. *Risalah: Jurnal Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta*, 2(6).
- Aslan, & Hifza. (2019). Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang di Sambas, Indonesia. *Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 171–188. <https://doi.org/10.28918/jei.v4i2.2295>
- Astuti, D. (2016). Sekolah Guru B I Negeri Yogyakarta Tahun 1946-1961. *Risalah: Jurnal Prodi*

- Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta*, 2(6), 1–14. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/risalah/article/view/1547/1373>
- Buchori, M. (2009). *Evolusi Pendidikan di Indonesia Dari Kweekschool Sampai ke IKIP: 1852-1988*. Insist Press.
- Dangu, A. S., Sumarjiana, I. K. L., & Anto, R. (2022). Sejarah Pendidikan Indonesia Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1950. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 4717–4722. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1733>
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 9(2), 157. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i2.4168>
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>
- Herlina, N. (2017). Tiga Serangkai Dalam Pergerakan Nasional. In D. Marihandono (Ed.), *Ki Hajar Dewantara “Pemikiran dan Perjuangannya”* (p. 119). Museum Kebangkitan Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI.
- Hidayat, A. (2018). Dinamika Pembentukan Undang-Undang Pendidikan Dan Pengajaran Pertama Dan Penerapannya Di Indonesia (1950-1954). *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNINDRA 2018 “Kesiapan Dosen Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0,”* 12–30. <http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/dispangenap2018/article/view/181%0Ahttp://proceeding.unindra.ac.id/index.php/dispangenap2018/article/viewFile/181/113>
- Kosasih, A. (2016). Perjuangan Organisasi Guru Di Masa Revolusi. *Sosio-E-Kons*, 8(2), 91–103.
- Kurnia, H., & Hudaidah, H. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Kondisi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945 – 1966). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 839–846. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/448>
- Muttaqin, A. (1995). *Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (Studi Tentang Dinamika Pembaharuan Sistem Pendidikan Kader Ulama)*.
- PB PGRI. (2020). *Sejarah Singkat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)*. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). https://pgri.or.id/wp-content/uploads/2020/11/versi-perubahan-lengkap-SEJARAH-SINGKAT-PGRI_2020.pdf
- Rahmat, A. (2017). *Pengantar Pendidikan: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Ideas Publishing. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Rifa'i, M. (2016). *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Ar-Ruzz Media.
- Royani, A. (2018). Pesantren Dalam Bingkai Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(1), 121. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i1.75>
- Sjamsuddin, H., Sastradinata, K., & Hasan, S. H. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)* (A. Gonggong (ed.)). Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Sugiono, Aman, Kumalasari, D., Sutopo, & Nuryanto, A. (2020). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Universitas Negeri Yogyakarta. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132296045/penelitian/buku-peta-jalan-pendidikan-indonesia.pdf>
- Sujatmoko, E. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181–211. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/718/204/405>
- Suradi Hp, Safwan, M., Latuconsina, D., & Samsurizal. (1986). *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan* (D. Hardjowidjono (ed.)). Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Syahrudin, & Susanto, H. (2019). *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi)* (B. Subiyakto (ed.)). Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Yonardi, A. (2018). *Pendidikan Guru di Indonesia: Periode Awal Tahun 1950-1965*. Universitas Negeri Jakarta.